

EVALUASI PEMBANGUNAN FISIK KAWASAN PARIWISATA LOVINA DI KABUPATEN BULELENG

Nyoman Danendra Putra

STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Indonesia
danenp76@yahoo.com

Pradna Lagatama

STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Indonesia
pradnalagatama@gmail.com

Abstract

Physical development in the Lovina Tourism Area has several impacts, so it is necessary to conduct an evaluation of the development in the Lovina Tourism Area. Problems that arise regarding: 1) Impact arising from physical development; 2) Development of the Lovina Tourism Area is evaluated from a physical aspect. The research objective is to evaluate the physical development in the Lovina Tourism Area in Buleleng Regency towards sustainable tourism. Data were collected through group discussions, observations, and interviews. Sampling through group discussion (group discussion) and interviews. In analyzing the problems and research results, quantitative descriptive analysis was used. The results showed that the physical development in the Lovina Tourism Area had an impact on the Lovina Tourism Area, including: Physical impact, namely the proliferation of buildings as a means of tourism which resulted in excess supply, changes in beach cleanliness conditions, poorly maintained condition of tourism facilities; Social impact, namely changes in community behavior that mimic external cultural behavior, increased unemployment; The cultural impact, namely changes in traditional ceremonial facilities, decreased mutual cooperation and reduced artistic activities. The evaluations that have been carried out include: Physical aspects, namely the conversion of agricultural land to tourism land, less optimal public facilities to support tourism, not optimal waste or waste management, and violations of party boundaries; Social aspects, namely changes in the behavior of the people who tend to imitate foreign cultures, as well as shifting market segments from foreign tourists to domestic tourists; Cultural aspects, namely the decline in mutual cooperation activities, the decline in artistic activities, the erosion of the subak organization due to the narrowing of agricultural land. The government is expected to organize tourism facilities to create an attraction for the Lovina Tourism Area towards sustainable tourism and in accordance with the new life order.

Keywords: Evaluation, Tourism Area.

Abstrak

Pembangunan fisik di Kawasan Pariwisata Lovina menimbulkan beberapa dampak sehingga perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap pembangunan di Kawasan Pariwisata Lovina. Masalah yang muncul berkenaan: 1) Dampak yang ditimbulkan dari pembangunan fisik; 2) Perkembangan Kawasan Pariwisata Lovina di evaluasi dari aspek fisik. Tujuan penelitian yaitu mengevaluasi pembangunan fisik di Kawasan Pariwisata Lovina di Kabupaten Buleleng untuk menuju pariwisata yang berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui kelompok diskusi, observasi, dan wawancara. Pengambilan sampel melalui kelompok diskusi (*group discussion*) dan wawancara. Dalam menganalisis masalah dan hasil penelitian, digunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fisik di Kawasan Pariwisata Lovina menimbulkan dampak di Kawasan Pariwisata Lovina, antara lain : Dampak fisik yaitu menjamurnya bangunan sebagai sarana pariwisata yang menimbulkan kelebihan *supply*, perubahan kondisi kebersihan pantai, kondisi fasilitas pariwisata yang kurang terpelihara; Dampak sosial yaitu perubahan perilaku masyarakat yang meniru perilaku budaya luar, meningkatnya pengangguran; Dampak budaya yaitu perubahan sarana upacara adat, menurunnya kegiatan gotong royong berkurangnya aktivitas kesenian. Adapun evaluasi yang telah dilakukan, antara lain : Aspek Fisik yaitu konversi lahan pertanian menjadi lahan pariwisata, kurang optimalnya fasilitas umum penunjang

pariwisata, belum optimalnya pengelolaan sampah atau limbah, dan adanya pelanggaran sempadan pantai; Aspek sosial yaitu terjadi perubahan perilaku masyarakat yang cenderung meniru budaya luar, serta beralihnya segmen pasar dari wisatawan mancanegara ke wisatawan domestik; Aspek budaya yaitu menurunnya kegiatan gotong royong, menurunnya aktivitas kesenian, semakin terkikisnya organisasi subak akibat lahan pertanian semakin sempit. Pemerintah diharapkan menata fasilitas wisata untuk menciptakan daya tarik terhadap Kawasan Pariwisata Lovina menuju pariwisata yang berkelanjutan dan sesuai dengan tatanan kehidupan baru.

Kata kunci: Evaluasi, Kawasan Pariwisata

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Bali umumnya mengalami perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan perkembangan pembangunan diberbagai sektor perekonomian. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata merupakan sektor andalan yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Bali, sehingga perlu terus dikembangkan, sesuai dengan kondisi, potensi, dan sumberdaya lainnya yang dimiliki masing-masing kawasan. Kondisi potensi dan sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh masing-masing kawasan tersebar di semua kabupaten yang ada di Bali sesuai dengan karakteristik daerahnya.

Salah satu kabupaten yang memiliki daya tarik alam yang masih baru dan luas adalah Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Perda Provinsi Bali Nomor 14 tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Terhadap Perda Bali No. 14 Tahun 1996 mengenai penetapan kawasan pariwisata, Kabupaten Buleleng ditetapkan menjadi dua kawasan pariwisata.

Sekarang ini kawasan pariwisata di Kabupaten Buleleng terdiri atas 3 Kawasan Pariwisata, yaitu : 1) Kawasan Pariwisata Batu Ampar, terdiri dari : Desa Penyabangan, Desa Banyu Poh, Desa Pemuteran, Desa Sumber Kima, dan Desa Pejarakan; 2) Kawasan Pariwisata Lovina, terdiri dari : Desa Pamaron, Desa Tukad Mungga, Desa Anturan, Desa Kalibukbuk, Desa Kaliasem, Desa Temukus, Desa Tigawasa, dan Desa Kayuputih; 3) Kawasan Pariwisata Buleleng Timur, terdiri dari : Desa Penuktukan, Desa Sambirenteng, dan Desa Tembok.

Diantara ketiga kawasan pariwisata tersebut, Kawasan Pariwisata Lovina merupakan kawasan dengan potensi pariwisata yang cukup penting bagi Kabupaten Buleleng. Perkembangan Kawasan Pariwisata Lovina cukup pesat karena berada pada jalur strategis, yaitu menghubungkan Kota Kabupaten Buleleng (Kota Singaraja) dengan Gilimanuk (penghubung antara Pulau Bali dengan Pulau Jawa). Selain itu, Kawasan Pariwisata Lovina juga memiliki potensi seperti: 1) Lokasi yang jauh dari keramaian dengan bibir pantai yang landai dan lebar serta berpasir hitam; 2) Memiliki keanekaragaman flora dan fauna perairan bawah laut yang beragam; 3) Pemandangan laut pada sore hari (*sun set*) dan pagi hari (*sun rise*); 4) Berbagai macam atraksi wisata berenang (*swimming*), menyelam (*snorkling*), berlayar dan memancing serta adanya atraksi khusus yaitu atraksi Lumba-lumba (*dolphins*). Disamping potensi alam, Kawasan Pariwisata Lovina juga ditunjang oleh potensi budaya masyarakatnya seperti: desa adat tradisional dan kesenian rakyat seperti Joged dan Sapi Gerumbungan.

Pembangunan fasilitas pariwisata secara berlebihan di Kawasan Pariwisata Lovina, terutama pembangunan hotel dan restoran, memicu datangnya warga berbagai daerah untuk mencari pekerjaan di daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena pemikiran dari pelaku-pelaku pariwisata untuk menyediakan fasilitas pariwisata. Dalam kenyataannya, banyak jumlah kamar yang kosong sehingga terjadi penurunan pendapatan pelaku pariwisata, adanya isu perubahan fungsi kamar hotel yang di pergunakan untuk tindakan prostitusi, pembangunan fasilitas pariwisata lokasinya sangat dekat dengan pantai/sungai (melanggar sempadan pantai maupun sempadan sungai) seperti yang terjadi di seputar Desa Kaliasem dan Kalibukbuk. Adanya konflik antara berbagai pihak yang terjadi di Kawasan Pariwisata Lovina, seperti konflik antara pemerintah dengan masyarakat pariwisata, konflik antara pemilik hotel dengan desa adat

di Desa Kalibukbuk mengenai batas kepemilikan tanah serta adanya sungai yang penuh dengan sampah-sampah yang langsung menuju laut, sehingga menyebabkan laut kotor dan mengganggu keindahan laut.

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, beberapa permasalahan yang terjadi di Kawasan Pariwisata Lovina, antara lain: 1) Banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pembangunan kepariwisataan ditinjau dari segi fisik di Kawasan Pariwisata Lovina, 2) Dampak dari pembangunan fisik di Kawasan Pariwisata Lovina maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Kawasan Pariwisata Lovina sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk pariwisata berkelanjutan di Kawasan Pariwisata Lovina. Evaluasi yang dimaksud yaitu membandingkan kondisi sebelumnya dalam 5 tahun terakhir dengan kondisi pada saat ini.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pola Pengembangan Kawasan Pariwisata

Tahapan perkembangan pariwisata membawa implikasi serta dampak yang berbeda. Butler 1980 (dalam Sukarsa, 1998: 60-61) secara teoritis tahap pengembangan pariwisata ada enam, yaitu:

- a) Tahap penemuan: pada tahap ini daerah tujuan wisata (DTW) ditemukan oleh sejumlah orang sebagai wilayah wisata baru mereka umumnya para pengembara, penjelajah, dan atau pecinta alam. Motif para pengembara (*travel style*) pada dasarnya adalah eksplorasi, berburu, santai atau sekedar menyalurkan hasrat kecintaan pada kehidupan alamiah. Di daerah tujuan wisata ini para pengembara tidak memiliki pengharapan untuk diperlukan secara profesional.
- b) Tahap keterlibatan; pada tahap ini inisiatif masyarakat lokal menyediakan fasilitas wisatawan, kemudian promosi daerah dimulai dengan keterlibatan pemerintah. Hasilnya, terjadi peningkatan jumlah wisatawan. Tipe wisatawan mulai berubah, fasilitas pariwisata mulai bermunculan. Ini terjadi karena tipe wisatawan berbedadan menginginkan pelayanan yang profesional. Sementara itu kesadaran wisata dan gaya serta taraf hidup masyarakat setempat mulai mengalami peningkatan dan pemerintah mulai ikut campur dalam pembangunan prasarana dan sarana kepariwisataan. Namun demikian dalam pengelolaan berbagai fasilitas kepariwisataan tersebut dilakukan semata-mata sebagai tanggapan dan inisiatif lokal yang bersifat spontan, belum terkoordinasi dan memenuhi standar kepariwisataan.
- c) Tahap pengembangan dan pembangunan; pada tahap ini jumlah wisatawan yang datang meningkat tajam. Pada musim puncak wisatawan, bisa menyamai bahkan melebihi jumlah penduduk lokal. Investor luar berdatangan memperbaharui fasilitas. Sejalan dengan meningkatnya jumlah dan popularitas daerah pariwisata, masalah-masalah rusaknya fasilitas pariwisata mulai terjadi.
- d) Tahap konsolidasi dan interelasi; pada tahap ini, tingkat pertumbuhan sudah mulai menurun walaupun jumlah wisatawan masih relatif meningkat. Daerah pariwisata belum berpengalaman mengatasi masalah dan kecenderungan terjadinya monopoli sangat kuat.
- e) Tahap kestabilan; pada tahap ini jumlah wisatawan yang datang pada musim ramai, tidak mampu dilayani oleh daerah tujuan wisata. Ini disadari bahwa kunjungan ulangan wisatawan dan pemanfaatan bisnis dan komponen-komponen lain pendukungnya sangat di butuhkan untuk mempertahankan jumlah wisatawan yang berkunjung. Daerah wisata makin mengalami masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- f) Tahap penurunan kualitas (*decline*) atau kelahiran baru (*rejuvenation*); pada tahap ini pengunjung kehilangan daerah tujuan wisata yang diketahui semula dan menjadi resort baru. Kepemilikan berpeluang kuat untuk berubah, dan fasilitas-fasilitas pariwisata, seperti akomodasi akan berubah

pemanfaatannya. Akhirnya pengambil kebijakan mengakui tingkatan ini dan memutuskan untuk dikembangkannya sebagai "kelahiran baru". Selanjutnya terjadi kebijaksanaan baru dalam berbagai bidang seperti pemanfaatan, pemasaran, saluran distribusi, dan meninjau kembali posisi daerah tujuan wisata tersebut.

Perencanaan, strategi pengelolaan, dan evaluasi yang berkesinambungan dapat dilaksanakan melalui beberapa pendekatan pariwisata. Menurut Spilane (dalam Suardana 2004 : 21) ada beberapa pendekatan perencanaan pengembangan pariwisata, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan *Advocacy*

Pendekatan ini mendukung pariwisata dan menekankan keuntungan ekonomis dari pariwisata. Potensi pariwisata bisa dipakai untuk mendukung macam-macam kegiatan ekonomis, menciptakan lapangan kerja baru, memperoleh devisa asing yang dibutuhkan bagi pembangunan. Perkembangan pendekatan ini mencapai puncaknya pada tahun 1960-an dan menarik perhatian baru dunia pariwisata internasional dan nasional.

2. Pendekatan *Cautionary*

Jika pariwisata baru dipandang dari satu sisi saja, ada dorongan untuk memunculkan pendekatan lain yang kemudian dikenal sebagai pendekatan *cautionary*. Pendekatan ini muncul pada tahun 1970-an, baik yang mempertanyakan maupun yang menolak sama sekali pendekatan *advocacy*. Mereka yang berada pada sisi pendekatan *cautionary* menekankan bahwa pariwisata dapat mengakibatkan banyak kerugian (*disbenefits*) dalam berbagai aspek sosio-ekonomi, seperti menimbulkan lapangan kerja musiman dan kasar (rendahan), mengakibatkan bocornya devisa, menyebabkan komersialisasi budaya, serta menyebabkan berbagai macam konflik.

3. Pendekatan *Adaptacy*

Pendekatan *adaptacy* dan pendekatan *cautionary* saling bertentangan, sehingga muncul bentuk pendekatan baru yang menyadari bahwa pariwisata mempunyai unsur baik positif maupun negatif. Pendekatan *adaptacy* menyebutkan bahwa pengaruh negatif pariwisata dapat dikontrol dengan mencari bentuk lain perkembangan pariwisata dari selama ini yang sudah dikenal secara umum, atau dengan menyesuaikan pariwisata dengan negara atau daerah tujuan wisata. Cara berpikir baru ini berdasarkan pandangan bahwa alam dan budaya dapat digabungkan dalam satu konteks. Oleh karena itu, pendekatan ini mengusulkan strategi seperti pembangunan pada skala kecil, pariwisata yang terkontrol, pariwisata yang dapat bertahan lama (*sustainable*), pariwisata dengan cara menikmati kehidupan masyarakat setempat, dan pariwisata yang berkaitan dengan ekologi (*eco-tourism*). Pendekatan ini membuat manusia sadar akan bahayanya pariwisata massal (*mass tourism*). Oleh karena itu, pendekatan ini mengusulkan beraneka ragam bentuk alternatif untuk mengembangkan pariwisata. Penganut ini juga mengusulkan bentuk pariwisata dengan pandangan selera tuan rumah maupun tamu. Contoh dari bentuk alternatif ini adalah wisata agro (*agricultural tourism* atau *farm tourism*), pariwisata yang melibatkan seluruh masyarakat (*community tourism*), pariwisata pada skala kecil (*cottage tourism*), pariwisata festival (*festival tourism*), dan pariwisata lingkungan (*eco-tourism*). Semua alternatif di atas dikenal sebagai pendekatan *development*. Alternatif ini menganggap bahwa pariwisata dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat tuan rumah dan peka akan selera masyarakat tuan rumah. Dapat dipercaya bahwa perkembangan tersebut sebetulnya mempengaruhi pilihan wisatawan terhadap daerah tujuan wisatanya dan demikian juga cara kehidupan mereka di daerah tujuan wisata, atau bentuk alternatif pariwisata ini mengurangi jurang pemisah antara hak dan tanggung jawab dari tamu, tuan rumah, dan perantaranya.

4. Pendekatan *Knowledge Based*

Pendekatan ini adalah pandangan yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Dengan memanfaatkan beberapa hal yang positif dan negatif dari semua pandangan di atas, pendekatan ini menggunakan pandangan yang sistematis terhadap pariwisata. Selain itu, pendekatan ini juga menganggap bahwapariwisata adalah bidang penelitian yang *multi-disipliner* dan cenderung menerapkan teori dan metode dari berbagai bidang yang berkaitan dengan pariwisata. Pendekatan ini menggabungkan beberapa bidang pengetahuan sebagai landasannya. Di samping itu, pendekatan ini tetap membuka diri terhadap ketiga pendekatan lainnya. Pendekatan *knowledge based* ini secara selektif menggabungkan ketiga pendekatan lain dengan masing-masing memberikan sumbangannya sendiri.

2. Kawasan Pariwisata

Menurut UU No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Kawasan pariwisata merupakan daerah yang diperuntukkan dan direncanakan secara terpadu serta menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan wisatawan termasuk segenap akomodasi dan fasilitas yang di perlukan, tanpa adanya bauran peruntukan fasilitas umum lainnya di daerah tersebut. Pembangunan sarana pariwisata di daerah tujuan wisata maupun obyek wisata tertentu harus di sesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik kuantitatif maupun kualitatif. Lebih dari itu selera pasardapat menentukan tuntutan sarana yang dimaksud. Untuk hal inilah maka perencanaan pengembangan kawasan pariwisata bila dilakukan dengan baik akan memberikan manfaat yang sebesar besarnya dan dapat pula memperkecil semua efek sampingan yang tidak menguntungkan.

Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri. perlu dipertimbangkan dari berbagai macam segi, karena pariwisata sebagai suatu industri tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan erat dengan sektor-sektor ekonomi, sosial, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Pengembangan pariwisata hendaknya sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai. Keputusan pertama yang harus diambil oleh suatu daerah adalah, apakah sudah ada kesepakatan diantara pemuka/pejabat setempat bahwa daerah itu akan di kembangkan menjadi kawasan pariwisata atau daerah tujuan wisata. Apakah manfaat dan keuntungan langsung bagi penduduk sekitarnya, sehingga pengembangan pariwisata selanjutnya akan mendapat dukungan dari masyarakat banyak.

Adapun aspek-aspek yang perlu diketahui dalam perencanaan pengembangan pariwisata adalah:

1. Wisatawan (*Tourist*)
Pengembangan pariwisata harus didahului dengan penelitian tentang karakteristik wisatawan yang di harapkan datang. Dari negara mana saja mereka datang, anak muda atau orang tua, pengusaha atau pegawai biasa, apa kesukaannya, dan pada musim apa saja mereka melakukan perjalanan.
2. Pengangkutan (*Transportations*)
Bagaimana fasilitas transportasi yang tersedia, baik yang akan membawa wisatawan dari negaranya ke daerah tujuan wisata yang akan dituju, maupun transportasi lokal di daerah tujuan wisata.
3. Atraksi/ Objek Wisata (*Attractions*)
Apakah objek dan atraksi wisata yang akan dijual sudah memenuhi criteria: apa yang akan dilihat (*something to see*), apa yang dapat dilakukan (*something to do*), dan apa yang dapat dibeli (*something to buy*) di daerah tujuan wisata yang dikunjungi.
4. Fasilitas Pelayanan (*Services Facilities*)
Fasilitas yang harus tersedia di daerah tujuan wisata tersebut adalah : sarana akomodasi, restoran, pelayanan umum seperti bank, kantor pos, telepon, internet, dan sebagainya. Informasi dan Promosi (*Informations*)

Wisatawan perlu memperoleh informasi tentang daerah tujuan wisata yang akan dikunjunginya, sehingga diperlukan informasi untuk mempublikasikan tentang paket wisata, baik dalam bentuk iklan, *leaflets* atau *brochures*, sehingga wisatawan mudah untuk mengambil keputusan (Yoeti, 1997:2-4).

Di samping kebijakan pada tingkat nasional, kebijakan pada tingkat daerah juga dikeluarkan sebagai pedoman dalam mengembangkan objek dan daya tarik wisata, khususnya di Provinsi Bali telah mengeluarkan pedoman tentang prinsip-prinsip pengembangan objek dan daya tarik wisata (Anonim, 1999 : 11) yang isinya antara lain:

- a) Mempertahankan ciri khas tiap daerah (kadang-kala ciri khasnya hilang akibat renovasi).
- b) Direncanakan sesuai kepentingan lokal dan pariwisata.
- c) Memuaskan bagi wisatawan yang mengadakan perjalanan jauh/biaya mahal.
- d) Menghindari sekecil mungkin pencemaran lingkungan dan kebudayaan.
- e) Kemudahan pencapaian dan mempunyai hubungan yang mudah dengan akomodasi.
- f) Layak sesuai dengan lingkungan atau daerahnya.
- g) Penganekaragaman atraksi dikembangkan sesuai dengan lingkungan.
- h) Biaya pengembangan disesuaikan proyeksi kunjungan wisatawan sehari-hari.
- i) Jumlah kunjungan wisatawan harus sesuai dengan daya dukung objek dan daya tarik wisata.
- j) Perencanaan didasarkan kepada ciri-ciri yang spesifik dan pengembangan disesuaikan dengan keautentikannya.

Sementara itu, Suwanto (1997:88-89) menjelaskan bahwa pengembangan objek dan daya tarik wisata secara rinci perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Fasilitas perdagangan dan fasilitas lainnya tidak diperkenankan dibangun terlalu dekat dengan objek dan daya tarik wisata sehingga mutu objek tidak tercemar.
- b) Fasilitas komersial dibangun diintegrasikan dengan tempat parkir.
- c) Perencanaan tempat komersial berorientasi pada orang-orang pejalan kaki, memperhatikan hal-hal yang terbaik dimana akan dibutuhkan banyak kios-kios (jalur melingkar).
- d) Tempat parkir minimal 50 meter dari objek dan daya tarik wisata dan ditutup dengan pepohonan (penghijauan)
- e) Menjual cinderamata khas objek setempat antara lain : kerajinan. lukisan. dan hasil pertanian.

3. *Pembangunan Berlanjut Untuk Bali*

Dalam kaitannya dengan uraian yang disajikan oleh Komisi Dunia Untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan (UNWCED), sejak lokakarya tahunannya yang pertama PPBB (1989, 3) telah memutuskan untuk berpegangan pada definisi pembangunan berlanjut untuk Bali, yang harus meliputi:

- a) Tidak hanya mempertimbangkan kesinambungan sumber daya alam sebagai kebutuhan dasar hidup tetapi juga kesinambungan sumber daya budaya (dari nilai-nilai dan legenda, sampai upacara dan bangunan kuno).
- b) Tidak hanya mempertimbangkan kesinambungan produksi tetapi juga kesinambungan budaya itu sendiri. Namun, pertimbangan "kesinambungan budaya tidak menghalangi adanya kemungkinan perubahan penampilan budaya dari waktu ke waktu, karena budaya lebih bersifat dinamik daripada statik".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan berlanjut harus memperhatikan tidak hanya keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan tetapi juga keseimbangan yang didasarkan pada budaya dalam warisan budaya Bali.

Dalam strategi awal yang disusun pada waktu loka karya tahunan yang ketiga PPBB (1991, 2-4) menyederhanakan konsep pembangunan berlanjut di Bali dalam tiga hal pokok:

- a) Kestinambungan sumberdaya alam dan produksi.
- b) Kestinambungan budaya dan kestinambungan dalam budaya.
- c) Pembangunan sebagai proses yang meningkatkan kualitas hidup.

Untuk menerapkan konsep pembangunan berlanjut, Proyek Pembangunan Bali Berlanjut (1991, 2-4) menyarankan tujuh kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendukung pembangunan berlanjut. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- a) Keutuhan ekologi
- b) Efisiensi
- c) Pemerataan
- d) Keutuhan budaya
- e) Komunitas
- f) Keseimbangan
- g) Pembangunan sebagai perwujudan dari potensi yang ada

Bahasan yang disampaikan di atas menggambarkan bahwa pembangunan berlanjut merupakan suatu konsep yang mengandung beberapa dimensi. Konsep ini merupakan suatu falsafah yang mengandung arti bahwa konsep menggambarkan suatu pandangan sendiri tentang bagaimana seharusnya bentuk masyarakat yang akan datang, Konsep ini juga menunjukkan perlunya proses untuk mewujudkan pandangan tersebut, dan yang ketiga, menggambarkan bentuk dari produk yang harus di wujudkan.

Kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan banyak bergantung pada akses atas kekuasaan, sumber daya dan pengetahuan. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi, sebab kendati masyarakat lokal memiliki akses atas kekuasaan dan sumberdaya, bila tidak disertai dengan pengalaman yang cukup, serta tidak mengetahui implikasi dari pembangunan kepariwisataan secara lengkap, maka mereka hanya akan mementingkan kepentingannya sendiri (Wall, 1996:134-134). Karena itu, bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat lokal harus disesuaikan dengan budaya setempat dan menghargai bentuk-bentuk pengambilan keputusan secara tradisional.

Pemberdayaan masyarakat, yang dalam hal ini lebih di titik beratkan pada peningkatan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan, tidak lain adalah usaha membuka akses atas kekuasaan, sumberdaya, dan kerjasama dengan pemerintah serta pihak swasta. Usaha tersebut mulai memunculkan keadilan dalam masyarakat terkait dengan pembangunan kepariwisataan. Namun, peningkatan partisipasi masyarakat tersebut haruslah diikuti dengan reformasi atau perubahan kelembagaan (*institutional reform*) sehingga membuka kesempatan bagi berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat untuk mengorganisasikan dan mempresentasikan dirinya masing-masing dan meningkatkan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.

Peran pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan hendaknya lebih di titik beratkan pada usaha untuk mengkoordinasikan kepariwisataan dengan sektor-sektor lainnya serta tujuan-tujuan pembangunan nasional. Struktur-struktur hierarkis kelembagaan dan proyek-proyek pembangunan yang berdasarkan pada kepentingan elit penguasa, hendaknya mulai ditinggalkan dan digantikan oleh proses-proses perencanaan yang lebih demokratis serta melibatkan seluruh pihak (*stakeholder*) yang terkait.

Dengan demikian, diharapkan seluruh kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perencanaan dapat di akomodasikan dalam suatu rencana yang telah di sepakati bersama. Implikasi dari hal tersebut adalah munculnya kesamaan arah pembangunan dan hasil-hasil yang di harapkan dan juga usaha-usaha penanggulangan masalah-masalah yang mungkin timbul dari pelaksanaan rencana tersebut. Tentu saja, dalam pelaksanaan rencana yang telah disepakati bersama, perlu adanya suatu konsistensi sikap dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perencanaan. Dari sisi pemerintah, *political will* dan

law enforcement akan menjadi sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilannya memainkan peran sebagai pendorong kepariwisataan berkelanjutan.

4. Konsep Evaluasi Purnahuni

Menurut Harvey Z. Robinowitz (dalam Hendro Sangkoyo 1985 : 546), istilah evaluasi purna huni dalam hal ini merupakan suatu hal yang baru dalam mendesain suatu produk fisik, namun konsep ini telah mempunyai dampak yang sangat penting. Jenis evaluasi ini yang menghasilkan suatu peraturan-peraturan yang dapat di terapkan, tepat, tersebar, dan diatas segala-galanya, bermanfaat dalam proses desain yang berkenaan dengan keputusan-keputusan teknis dan fungsional dan cara produk dapat mempengaruhi perilaku pemakai.

Suatu produk kawasan perlu di nilai karena alasan yang sama pentingnya seperti juga hasil-hasil, guna mencegah kegagalan seperti: mengakibatkan kecelakaan, tidak berfungsi dengan baik, atau tidak cocok, guna memberikan nilai yang lebih baik untuk para penghuni suatu kawasan dan pertanggungjawaban bagi mereka yang memikul tanggung jawab untuk pelaksanaannya, dan guna memberikan tambahan kemajuan nyata dari segi memajukan lapangan atau hasil.

Pemrograman memainkan peranan kunci dalam menyarankan dan menentukan banyak tolok ukur desain pokok. Pemrograman adalah alat perspektif yang digunakan oleh perancang dalam membuat pemecahan-pemecahan. Tetapi ada suatu yang hilang yakni suatu proses evaluasi atau langkah diagnostik guna mutu suatu kawasan. Tujuan dari evaluasi purnahuni adalah membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dengan mengetahui akibat-akibat dari keputusan-keputusan yang di buat dimasa lalu. Kita ingin belajar dari pengalaman masa lalu. Seperti yang dinyatakan oleh Oscar Wilde: "Pengalaman adalah sepatah kata yang kita gunakan untuk melukiskan kesalahan kesalahan kita". Penilaian purnahuni terutama berfokus pada tiga faktor yaitu: 1) evaluasi teknis, 2) evaluasi fungsional, dan 3) evaluasi perilaku.

Faktor-faktor teknis adalah lingkungan latar belakang dari suatu kawasan, latar belakang lingkungan yang sering tidak menarik bagi tindakan-tindakan dan perilaku kita seperti jalan masuk kawasan, penempatan bangunan, tempat parkir, dan lain-lain. **Faktor-faktor fungsional** menunjang kegiatan-kegiatan dalam suatu kawasan misalnya tempat hotel merupakan hal pokok dalam suatu kawasan, tempat kolam renang merupakan hal yang sangat pokok dalam suatu hotel berbintang. **Faktor-faktor perilaku** bisa besar pengaruhnya terhadap penghuni suatu kawasan. Sifat faktor-faktor perilaku seperti modal, keamanan, dan komunikasi dapat dipengaruhi oleh rancangan suatu kawasan.

C. METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian evaluasi pembangunan Kawasan Pariwisata Lovina di Kabupaten Buleleng ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Stouss dan Corbin (2003), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan perilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian di Kawasan pariwisata Lovina ini adalah pendekatan teoritisasi data (*grounded theory approach*), yaitu metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori *grounded*, yang disusun secara induktif tentang suatu fenomena (Strauss dan Corbin, 2003). Temuan penelitiannya merupakan rumusan teori tentang realitas yang diteliti, bukan sekedar sederet angka atau sejumlah tema yang kurang berkaitan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kawasan Pariwisata Kalibukbuk atau Lovina, Kabupaten Buleleng, sekitar 78 km dari Kota Denpasar atau dengan jarak tempuh sekitar 2.5 jam. Jarak pencapaian ke Kawasan Pariwisata Lovina dari Kota Buleleng sekitar 8 km dengan waktu pencapaian sekitar 10 menit. Kawasan Pariwisata Lovina termasuk wilayah Bali Utara yang secara geografis berada pada posisi 08°08'40" Lintang Selatan (LS) dan 214°58'12" Bujur Timur (BT), sedangkan secara administrasi Lovina termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buleleng. Kawasan Pariwisata Lovina terdapat di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar dan Kecamatan Sukasada dan 8 (delapan) Desa dengan luas keseluruhan 5108 Ha, secara rinci yaitu:

1. Kecamatan Buleleng terdiri dari :
 - Desa Kalibukbuk : 263 Ha
 - Desa Anturan : 247 Ha
 - Desa TukadMugga : 148 Ha
 - Desa Pamaron : 146 Ha.
2. Kecamatan Banjar terdiri dari:
 - Desa Kaliasem : 628 Ha
 - Desa Tigawasa : 1.690 Ha
 - Desa Temukus : 491 Ha
3. Kecamatan Sukasada terdiri dari:
 - Desa Kayu Putin : 1.495 Ha

Sedangkan untuk batas-batas administrasi dari Kawasan Pariwisata Lovina adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Bali
- Sebelah Selatan: Desa Cempaga, Desa Pendawa, Desa Selat, Desa Tegal Linggah, Desa Panji Anom Panji.
- Sebelah Timur : Desa Bakti Seraga
- Sebelah Barat : Desa Dencarik.

D. BASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Pembangunan fisik di Kawasan Pariwisata Lovina

a. Dampak Fisik

Berdasarkan pada hasil kelompok diskusi, pengamatan langsung, dan wawancara, bahwa pembangunan fisik di Kawasan Pariwisata Lovina memberikan dampak pada :

- a) Perubahan kondisi pantai di Kawasan Pariwisata Lovina. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kebersihan pantai yang cenderung kurang mendapat perhatian. Padahal kebersihan pantai merupakan syarat mutlak bagi wisatawan untuk tertarik mengunjungi pantai tersebut. Di Kawasan Pariwisata Lovina, banyak terlihat sampah berserakan dan lumpur yang mengganggu keindahan terumbu karang yang ada di sekitar pantai Desa Kalibukbuk dan Desa Kaliasem sehingga kondisi ini sangat memprihatinkan bagi keberlanjutan pariwisata di Kawasan Pariwisata Lovina. Menurut penuturan dari pemandu menyelam di Kawasan Pariwisata Lovina (Bapak Komang Baru), bahwa kondisi sumber daya alam laut yaitu terumbu karang dan penyusun ekosistemnya, sebagian mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang diakibatkan oleh faktor alami yaitu banjir / air hujan dari sungai-sungai disekitar laut yang membawa lumpur dan sampah dari desa diatasnya.
- b) Kondisi fasilitas pariwisata yang kurang terpelihara. Hal ini dapat dilihat dari banyak hotel yang tidak mampu merenovasi bangunannya sehingga terkesan kurang terawat dan terpelihara sehingga

semakin sedikit wisatawan yang tertarik untuk menginap, kurangnya kebersihan, taman-taman hotel yang kurang terpelihara, kondisi alat transportasi yang perlu peremajaan, fasilitas hotel seperti: kasur, kursi, dan AC yang harus diganti.

b. Dampak Sosial

Berdasarkan pada hasil kelompok diskusi bahwa pembangunan di Kawasan Pariwisata Lovina berdampak pada :

- a) Terjadi konflik sosial antara penduduk local dengan warga pendatang akibat adanya sarana dan prasarana fisik
- b) Bertambahnya penduduk pendatang yang mencari pekerjaan di Kawasan Pariwisata Lovina otomatis menimbulkan persaingan dengan penduduk lokal.

5. Dampak Budaya

Berdasarkan pada hasil kelompok diskusi dan pengamatan langsung di Kawasan Pariwisata Lovina, pembangunan di Kawasan Pariwisata Lovina berdampak pada:

- a) Perubahan sarana upacara adat
- b) Kecenderungan penggunaan sarana upacara adat sebagai sarana upacara, sebagian besar masyarakat setempat menggunakan buah-buahan impor untuk upacara adat.
- c) Menurunnya kegiatan gotong royong
- d) Dengan pembangunan Kawasan Pariwisata Lovina, menyebabkan semangat masyarakat untuk melakukan gotong royong selain di pura-pura semakin menurun, seperti: gotong royong membersihkan pantai dan tempat umum lainnya.

2. *Perkembangan Kawasan Pariwisata Lovina Di Evaluasi Dari Aspek Fisik*

Berdasarkan pada hasil kelompok diskusi bahwa perkembangan suatu kawasan pariwisata atau pembangunan apapun yang dilakukan, pasti akan terjadi perubahan fisik. Perubahan fisik berkaitan dengan penggunaan lahan, ketersediaan fasilitas umum penunjang pariwisata, pembangunan hotel-hotel yang berada di dekat pantai, kondisi bangunan hotel dan restoran, sistem pengelolaan limbah industri dan limbah rumah tangga.

Sebagian besar penggunaan lahan di utara jalan Gilimanuk-Singaraja, berada di Desa Kaliasem, Desa Kalibukbuk, Desa TukadMungga, dan Desa Anturan. Sedangkan Desa Temukus, Desa Tigawasa, Desa Kayu Putih, dan Desa Pamaron, hanya sebagian kecil saja. Fasilitas-fasilitas umum penunjang pariwisata, hanya tersedia di Desa Kalibukbuk dan Desa Kaliasem. Sebagai contoh : WC umum, namun tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak tersedianya air, balon lampu, dan tidak ada perawatan. Fasilitas umum lainnya yang tersedia yaitu lampu penerangan pantai namun tidak menyala, bak sampah namun jumlah petugas pengangkut sampah sedikit sehingga kurang efektif, sarana telekomunikasi, fasilitas kesehatan, petugas keamanan, dan tempat informasi.

Berdasarkan pengamatan langsung, pengelolaan sampah atau limbah di Kawasan Pariwisata Lovina, sudah berjalan dengan baik namun masih ada yang membuang limbah ke sungai atau parit. Namun ada banyak Pengelolaan limbah untuk hotel-hotel sudah cukup bagus karena setiap hotel menggunakan sistim *septic tank*. Kondisi sungai di Kawasan Pariwisata Lovina, sering terlihat kotor, karena sampah yang ada di sungai-sungai merupakan sampah kiriman dari desa-desa yang ada di hulu. Sedangkan sampah yang ada di laut, berasal dari laut sekitarnya, dan ini terjadi pada saat angin kencang serta gelombang besar. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di sungai, sudah semakin membaik, Hal ini ditandai dengan adanya kewajiban untuk menyediakan tempat sampah di setiap rumah penduduk. Untuk di tempat umum diwajibkan untuk

melakukan gotong royong yang dilakukan setiap minggu oleh masyarakat setempat, Untuk itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah atau pengelolaan limbah, yaitu dengan:

- a) Mengumpulkan sampah pada tempat-tempat sampah sementara dan dialokasikan pada masing-masing pusat kegiatan pariwisata serta pemukiman, yang menghasilkan sampah seperti di Desa Temukus, Desa Kaliasem, Desa Kalibukbuk serta Desa Anturan.
- b) Menambah tempat-tempat pembuangan sampah sementara di masing-masing daerah pusat kegiatan pariwisata.
- c) Menambah armada pengangkutan yang dapat melayani seluruh kawasan wisata, seperti gerobak sampah, truk sampah, dan menambah personel yang dapat bekerja dengan baik untuk pengelolaan sampah.
- d) Untuk pembuangan limbah rumah tangga, ditampung dengan menggunakan *septic tank* dan bak-bak peresapan.
- e) Untuk limbah yang berasal dari kegiatan akomodasi wisata dan kegiatan fasilitas penunjangnya, diwajibkan untuk membuat bak-bak penampungan air buangan/limbah serta pengelolaan yang aman bagi lingkungan.

Sebagian besar hotel yang melanggar sempadan pantai, dibangun sebelum ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang batas sempadan pantai. Hal ini dapat dilihat di Desa Anturan, Desa Kalibukbuk, dan Desa Kaliasem. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam pembangunan fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata di Kawasan Pariwisata Lovina berdasarkan potensi, daya dukung, dan sumber daya yang ada, antara lain :

- a) Membatasi dan mengendalikan pembangunan fasilitas akomodasi wisata di sekitar bibir pantai, dengan tetap mempertahankan garis sempadan pantai 50-100 meter dari daratan.
- b) Menetapkan dan mengarahkan pembangunan fasilitas akomodasi wisata disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.
- c) Mengarahkan pembangunan fasilitas akomodasi, seperti: Hotel Bintang Satu, Hotel Bintang Dua, Hotel Melati, Penginapan / *Home Stay* dengan latar belakang/view menghadap ke laut, di sebelah utara jalan regional Singaraja-Gilimanuk sebagai pusat kegiatan pariwisata.
- d) Mengarahkan pembangunan fasilitas penunjang pariwisata di bagian selatan jalan regional, seperti : Restaurant dan Bar, Cafeteria, jasa pelayanan Pos dan Telekomunikasi (*Wartel* dan *Tourism Information*), jasa perbankan (*Money Changer*), jasa angkutan (*Travel*).
- e) Mengarahkan pembangunan fasilitas penunjang wisata berupa tempat pertunjukan kesenian tradisional, berdekatan dengan fasilitas akomodasi wisata.
- f) Membatasi pembangunan fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata di sekitar pantai, yang dimanfaatkan untuk kegiatan upacara keagamaan oleh umat Hindu.

Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan maka perlu dimantapkan dan dikelola bagian-bagian kawasan atau yang tetap memiliki fungsi lindung, dengan cara pengelolaan kawasan lindung dengan fungsinya masing-masing yaitu disepanjang pantai, disepanjang kiri kanan sungai, sekitar mata air, radius kesucian pura dan kawasan yang disucikan, serta kawasan disekitar jurang.

E. SIMPULAN

Dampak pembangunan di Kawasan Pariwisata Lovina, antara lain; Dampak fisik yaitu perubahan kondisi kebersihan pantai, kondisi fasilitas pariwisata yang kurang terpelihara; Dampak sosial yaitu hubungan antar organisasi yang semakin tidak jelas keberadaannya, meningkatnya pengangguran; Dampak budaya yaitu perubahan sarana upacara adat, menurunnya kegiatan gotong royong, berkurangnya aktivitas kesenian.

Perkembangan Kawasan Pariwisata Lovina dievaluasi dari : Aspek Fisik yaitu konversi lahan pertanian menjadi lahan pariwisata, kurang optimalnya fasilitas umum penunjang pariwisata, belum optimalnya pengelolaan sampah atau limbah, dan adanya pelanggaran sempadan pantai; Aspek sosial yaitu terjadi konflik antara penduduk pendatang dengan masyarakat lokal, antara pelaku-pelaku pariwisata, dan antar organisasi di bidang kepariwisataan, serta Aspek budaya yaitu menurunnya kegiatan gotong royong, menurunnya aktivitas kesenian, semakin terkikisnya organisasi subak akibat lahan pertanian semakin sempit, serta berkurangnya perilaku masyarakat yang kebarat-baratan (*touristic*).

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Denpasar: Magister Kajian Pariwisata Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- 1990. *Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Erawan, I Nyoman. 1994. *Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi (Bali Sebagai Kasus)*. Denpasar : Upada Sastra.
- France, Lesley. 1997. *The Earthscan Reader In Sustainable Tourism*. London: Earthscan Publication Ltd.
- Hadinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Kusmayadi, Endar Sugiharto. 2000. *Metodologi dalam Bidang Kepariwisataan*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama.
- Marzuki. 1991. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE - UI.
- Mill, Robert Christie. 2000. *Tourism The International Business* (ed. Bahasa Indonesia). Jakarta : PT. Raya Grafindo Persada.
- Paturusi, Syamsul Alam. 2003. *Perencanaan Kawasan Pariwisata*. Denpasar : Program Magister Pariwisata Universitas Udayana.
- Pendit, S. Nyoman. 2003. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Pitana. 2001. *Internasionalisasi dan Tradisionalisasi, Pariwisata dan Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Bali*. Makalah Seminar Lengkap. Denpasar : Universitas Udayana.
- Pitana dan Gayatri, 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Putra, I.B. Wyasa. 1999. *Dampak Kegiatan Kepariwisataan Terhadap Pelestarian Lingkungan Pantai dalam Perspektif Hukum Lingkungan, Majalah Ilmiah Pariwisata Analisis Pariwisata Vol. 2 No. 2*. Denpasar : Program Studi Pariwisata Universitas Udayana.
- Soehendra, Fery Hartadi. 2001. *Jurnal Manajemen Parwisata, Kepariwisataan Berkelanjutan: Suatu Perspektif Menuju Kepariwisataan yang Berkeadilan*. Denpasar : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Triatma Mulya.
- Stark, Rodney. 1987. *Sociology*. California: Wadsworth Publishing Company Belmont.
- Strauss, A dan J. Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukarsa. 1998. *Pengantar Parwisata*. Denpasar : Program Pariwisata Universitas Udayana.
- Yoeti, Oka A. 1993. *Pengantar Pariwisata*. Bandung. Angkasa
- 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.